

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia jangka panjang dan mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia dan bekal hidup di akhirat kelak. Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang pada hakikatnya berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik aspek jasmaniyah maupun rohaniyah. Pendidikan itu bertugas mempersiapkan generasi anak-anak bangsa sejak kecil melalui berbagai lembaga pendidikan agar mampu menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya di kemudian hari sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Namun pendidikan anak dibidang ilmu dan teknologi, perlu diimbangi dengan pendidikan agama, sebagai alat kendali yang menentukan arah dan kehidupan mereka dalam menentukan harkat dan martabat mereka sepanjang masa secara utuh, seimbang, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Hal-hal apa yang menjadi kekhawatiran akan dapat diantisipasi sejak dini. Allah SWT telah memperingatkan dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ (النساء : ٩)

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S. Al-Nisā'; 4:9)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾ (المنافقون : ٩)

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi (Q.S. al-Munāfiqūn; 63:9)

Peranan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dalam mengkomunikasikan dan mentransformasikan nilai-nilai agama, menjadi modal dasar bagi peserta didik untuk dapat dikembangkan. Diketahui, agama dan pendidikan sekolah belum sepenuhnya mampu memberikan nilai lebih dalam pembentukan moral dan kepribadian anak bangsa. Di sisi lain, kehadiran MDA sebagai penyelenggara pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan khususnya para orang tua untuk mengembangkan kehidupan anak-anaknya sebagai warga Indonesia yang berkepribadian, dan sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh serta berakhlak mulia. Dalam memenuhi keinginan dimaksud, MDA Baitul Haadi Padang telah menerapkan berbagai aktivitas manajemennya, berhasil memberikan solusi alternatif untuk mencapai tujuan dimaksud.

Pendidikan Islam sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional, memiliki peranan yang besar bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hal ini dipahami dari UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Selanjutnya pada bab 6 bagian kesembilan pasal 30 yang terdiri dari 4 ayat, intinya menyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, pada pendidikan formal, informal dan nonformal. Sementara pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Pada pasal 55 terdiri dari 5 ayat, pada intinya dinyatakan bahwa masyarakat dipandang berhak menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.¹

Pentingnya pendidikan keagamaan Islam, lahirnya PP No. 55 Tahun 2007² bab 3 bagian kesatu pasal 21 dan 25, tentang Pendidikan Diniyah nonformal, diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan *Al-qurān*, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lainnya yang sejenis, berbentuk satuan pendidikan. Diniyah Takmiliah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT dan dapat dilaksanakan di mesjid dan

¹Lihat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI., *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: 2006), h. 8, 21-22, dan 35

² Fokus Media (Tim Redaksi), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wajib Belajar*, (Peraturan Pemerintah RI. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan), (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 96-97

mushalla atau di tempat yang memenuhi syarat. Untuk melaksanakan peraturan dimaksud, telah diundangkan Permenag nomor 3 tahun 2012. Pada bab I pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa Diniyah Takmiliyah³ adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Madrasah Diniyah ini terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yakni Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Madrasah Diniyah Wustha (MDW), dan Madrasah Diniyah Ulya (MDU).

Di samping itu diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Padang No. 06 Th 2003 tentang kewajiban bagi peserta didik SD/MI pandai BTQ/A dan menjadi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2007 Pasal 13 (a) tamat SD pandai membaca, menulis, dan memahami ayat al Quran, mengenal tajwid dasar serta hafal 10 surat juz ‘Amma.

Abidin Syam⁴ mengungkapkan bahwa, peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan dalam ikut serta mengatasi dampak negatif perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan, meskipun jumlah lembaga tersebut terus meningkat. Oleh karena itu, strategi yang perlu

³ Permenag RI. No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, tanggal 21 Februari 2012, *Salinan sesuai aslinya*, oleh Mubarak, Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri, h. 3. Dan lihat: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah*, (Departemen Agama RI., 2007), h. 5. Istilah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), sebelumnya bernama Madrasah Diniyah. Di Kota Padang masih bernama MDA, MDW dan MDU.

⁴ Lihat, Zainal Abidin Syam, (Kepala Biro Perencanaan Departemen Agama RI.), Strategi Peningkatan Partisipasi Departemen Agama dalam Pembangunan Sektor Agama, *Makalah*, disampaikan pada seminar dalam Pentaloka Manajemen Strategis Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Agama tahun 2004, di Jakarta Juli 2004), h. 4-9

ditempuh adalah meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengembangan potensi lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

Madrasah Diniyah adalah sebagai wadah bagi berlangsungnya aktivitas manajerial dalam rangka mencapai tujuan organisasi, secara efektif dan efisien. Diketahui Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Ditpekapontren) melalui Keputusan Menteri Agama No. 1 tahun 2001, bahwa pengelolaan Madrasah Diniyah menjadi bagian penting dari Ditpekapontren.

Pentingnya pengelolaan Madrasah Diniyah, terlihat pada telah direalisasikan berbagai program Ditjen pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren tahun 2009, serta rencana tindak lanjutan dan penyempurnaannya, seperti: workshop pengembangan model implementasi kurikulum Madrasah Diniyah, peningkatan mutu pembina, dan bantuan operasional Madrasah Diniyah.⁵

Memperhatikan alasan di atas, diketahui bahwa adanya perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan Islam bagi anak-anak usia sekolah. Hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat, yang selama ini pendidikan agama itu berjalan sesuai kemampuan masyarakat dan pengurus mesjid dan mushalla di mana MDA itu berada atau didirikan.

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan Islam yang telah dikenal sejak penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan Agama Islam muncul secara alamiah melalui akulturasi secara damai sesuai kebutuhan

⁵ Lihat, Yusuf, Chairul Fuad, Laporan Semester Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun 2009, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI., Tahun 2009), h. 18 dan 39

masyarakat saat itu. Mustafa mengungkapkan,⁶ bahwa hampir seluruh pelosok desa di tanah air terdapat Madrasah Awaliyah dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti pengajian, surau, rangkang, sekolah agama dan lain-lain. Madrasah ini dikunjungi oleh anak laki-laki dan perempuan untuk belajar agama (*Al-qurān*, Ibadah, Akhlak, Keimanan, dan sebagainya), yang dilaksanakan pada sore hari dengan waktu belajar selama satu setengah jam.

Di Sumatera Barat,⁷ pendidikan Islam dikenal dengan Pengajian *Al-Qurān* dan Pengajian Kitab yang dinamakan sistem pendidikan Surau. Kemudian abad ke-20 pendidikan Islam mengalami perkembangan hingga melahirkan ulama atau guru besar dibidang Agama Islam dan pemimpin masyarakat, melahirkan tokoh perjuangan kemerdekaan serta melahirkan lembaga pendidikan yang dikenal dengan *madrasah*. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat Islam akan tambahan pendidikan dan pengajaran agama Islam bagi anak-anak mereka, tidak pernah terabaikan sejak dulu hingga sekarang.

⁶ Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h 110

⁷ Mardanas Safwan, dan Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*, (Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981), h. 57. Awalnya pendidikan Islam di Sumatera Barat berlangsung di rumah guru, di Surau yang lebih dikenal dengan “pengajian *al-Qurān*”, dan diasuh oleh seorang Malin atau Ulama. Lembaga ini tumbuh di setiap pemukiman masyarakat yang kemudian berkembang dengan nama Taman Pendidikan *Al-Qurān* dan Seni *al-Qurān* (TPA/TPSA), dikelola oleh pengurus mesjid dan mushalla. Melalui musyawarah Nasional II Lembaga Pengembangan Tilawatil-Qurān (LPTQ) di Banda Aceh, resmi diterima sebagai modus pendidikan *al-Qurān* secara Nasional (Lihat: Hasnawi Karim, Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat, dalam Kurikulum dan Pedoman Pengelolaan TPA/TPSA Proppinsi Sumatera Barat, (Padang: Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat, 1987), h. 10)

Menurut Irfan,⁸ keberadaan MDA sangat diperlukan disebabkan beberapa hal. *Pertama:* masyarakat merasakan bahwa pendidikan agama yang diterima di sekolah kurang memadai, demikian pula jumlah jam pelajaran agama yang disediakan. *Kedua:* sangat tingginya kebutuhan orang tua terhadap pembinaan kehidupan beragama dan pembinaan akhlakul karimah bagi putra putri mereka. *Ketiga* keresahan orang tua terhadap meningkatnya kemerosotan moral dikalangan anak usia sekolah.

Di sisi lain, masih banyak pula dari kalangan orang tua yang menginginkan agar anaknya memperoleh bobot pendidikan agama yang lebih memadai sebagai bekal hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Menurut Darwas,⁹ pandai mengaji atau mampu membaca *al-Qurān* sebagai pelajaran dasar di MDA, adalah menjadi harapan inti bagi masyarakat, sebagaimana masa lalu. Tapi semakin tahun semakin dirasakan masih kurangnya kemampuan dan sikap peserta didik mencerminkan tujuan yang diharapkan. Berkenaan dengan itu, Darwas mengharapkan manajemen MDA dan penyusunan program Pendidikan Islam, perlu dijadikan fokus utama. Sikap dan kemampuan membaca *al-Qurān* anak-anak masih jauh dari yang diharapkan sekalipun di mana-mana dilaksanakan acara khataman. Bagaimanapun tentunya hal ini sangat ditentukan oleh peran kepala dan guru sebagai ujung tombak keberhasilan anak.

⁸ Irfan, M., Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam, dalam: *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h.4

⁹ H. Darwas, Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat, Pandangan terhadap Kemampuan Baca *al-Qurān* Usia Sekolah yang belajar di TPA/MDA, disampaikan pada acara audiensi Pengurus BKS TPA/TPSA Propinsi Sumatera Barat di ruang kerjanya, Sabtu, 22 September 2007 H/10 Ramadhan 1428 H.

Peserta didik harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik secara sosial-institusional maupun secara fungsional akademik. Basuni Aziz¹⁰ memberikan pandangannya bahwa: “upaya untuk menghasilkan manusia-manusia cakap, berkemampuan dan profesional, harus dimulai dari jenjang pendidikan paling rendah.” Clifton Fadiman,¹¹ menyatakan bahwa, madrasah merupakan peta utama atau satu-satunya peta untuk pulau harta karun yang merasuk pada pikiran anak didik sendiri. Penyelenggaraan lembaga pendidikan dinyatakan sebagai pranata sosial yang paling mendominasi pranata-pranata lainnya. Oleh karena itu, MDA sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar, memberikan pendidikan keagamaan Islam agar para peserta didiknya memiliki kualitas keimanan, ketaqwaan, dan ilmu pengetahuan serta praktik-praktik ibadah dan keagamaan. Keberadaan MDA mempunyai arti sangat penting bagi pendidikan anak usia sekolah dan selanjutnya. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam – MDA - perlu ditingkatkan melalui penguasaan pengetahuan dan kemampuan manajerial kependidikan guna mencapai efektifitas lembaga pendidikan Islam MDA dimaksud.

Islam telah mengajarkan untuk amar makruf (tindakan proaktif) dan nahi mungkar (tindakan reaktif) terhadap lingkungan sekitarnya. Ajaran ini berimplikasi bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama; keluarga, sekolah, pemerintah, lingkungan sosial dan sebagainya. Ajaran dimaksud dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya sebagai berikut;

¹⁰ Basuni Aziz, *Pendidikan Indonesia dalam Pandangan 15 Tokoh Pendidikan wasta*, (Jakarta: Dasamedia Utama: 1993), h. 6

¹¹ Clifton Fadiman dalam Muhaimin, Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya)*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 305

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (ال عمران : ١٠٤)

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran; 3:104)

Menurut Syahril¹² perkembangan MDA di Kota Padang sejak berdirinya tahun 1966 hingga hadirnya kebijakan pemerintah Daerah Kota Padang, dalam pengelolaannya, telah terjadi perubahan yang bervariasi dan masih amat sederhana, belum menyeluruh dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam MDA dimaksud. Dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kualitas MDA bagi kepala dan guru telah dilaksanakan seminar tentang manajemen MDA, manajemen kurikulum, teknik pengajaran, dan lain-lain. Namun hal ini sangat terbatas sekali dan jauh dari maksimal, yang seharusnya dilaksanakan setiap tahun dan harus mengikutkan semua kepala dan guru MDA. Sementara untuk mengetahui keberhasilan MDA, setiap tahun baru Islam, FKMD melaksanakan berbagai kegiatan lomba bagi peserta didik MDA se-Kota Padang.

Pada sisi lain Darmis,¹³ pembina teknis MDA mengungkapkan, belum dapat berbuat banyak pada MDA. Namun telah melakukan berbagai kegiatan dan lebih banyak kerja sama dengan wadah FKMD, seperti melaksanakan sosialisasi, memberikan pengawasan, melakukan pembinaan dan memberikan bantuan tenaga

¹² Syahril Nadir, Pengurus FKMD Kota Padang Periode 2003-2007, wawancara langsung, di Sekretariat FKMD Kota Padang, Selasa 10 Juli 2007. Hal senada juga disampaikan Datuk Djohardi, Junaida, sekretaris FKMD Kota Padang.

¹³ Darmis Darwis, Kepala Seksi Pekapontren Kementerian Agama Kota Padang, wawancara, di Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Jum'at, 6 Juli 2007.

kepala dan guru MDA PNS, serta melakukan penilaian MDA. Melalui kegiatan tersebut telah ditemukan MDA dengan manajemen yang sudah baik walaupun baru sedikit sekali.

Berdasarkan pengalaman, belum ditemukan penelitian tentang manajemen MDA, melainkan terkait penelitian manajemen madrasah yang lebih fokus kepada madrasah diniyah formal dan pondok pesantren. Namun para ilmuwan yang mempunyai kewenangan, menyatakan bahwa: “Keberadaan lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah, masih jauh dari apa yang diharapkan umatnya.”¹⁴ “Bahkan, secara kualitatif, lembaga-lembaga yang muncul serta dinilai terkemuka (*outstanding*), masih jauh dari penilaian ideal.”¹⁵ Sementara perlu diketahui bahwa, pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban, dan sebagai aset bagi pembangunan pendidikan nasional. Sebagai warisan, merupakan amanah sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam dari masa ke masa. Sedang sebagai aset, harus ditata dan dikelola sesuai dengan sistem pendidikan nasional.¹⁶ Sekalipun penelitian tentang manajemen MDA belum ditemukan, tetapi melalui pengalaman pejabat terkait (Kasi Pekapontren), organisasi FKMD (wadah berhimpunnya kepala dan guru MDA) melalui musyawarah atau pertemuan bulanan, serta pengalaman masyarakat, diketahui bahwa MDA sangat dibutuhkan dan harus dikelola dengan baik agar melahirkan peserta didik yang

¹⁴ A. Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), h. 104

¹⁵ A. Malik Fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 250

¹⁶ Lihat, Husni Rahim, *Arah baru Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Logos Wacana, 2001), h. 3

baik. Hal-hal inilah yang mendorong pengurus secara bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas manajemen MDA.¹⁷

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari bagaimana manajemennya dan dukungan semua pihak. Kesemuanya merupakan sub sistem yang mendukung sistem pendidikan. Surachmad¹⁸ mengemukakan bahwa, berlangsungnya proses pendidikan di madrasah atau sekolah akan melibatkan unsur-unsur guru, siswa, materi, metode, media, penilaian, dan tujuan yang akan dicapai. Masing-masing unsur itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri dalam mencapai tujuan pendidikan dan baru akan berfungsi apabila kepala sebagai pelaksana terdepan mampu mengelola dan memanfaatkannya.

Manajemen MDA di Kota Padang berjalan umumnya ditentukan oleh pengelola MDA bersama yayasan atau pengurus mesjid dan mushalla, sesuai dengan situasi lingkungan sosial masyarakat masing-masing. Mulai dari pengangkatan kepala MDA, merekrut guru dan peserta didik, kurikulum pembelajaran, keuangan, pengadaan sarana dan lain-lain. Beragamnya pengelolaan MDA dan situasi tersebut, memberi warna dan dampak terhadap hasil yang diperoleh bagi MDA masing-masing. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, karena sudah menjadi kebiasaan berjalan secara alami oleh masyarakat sebagaimana diungkapkan di atas, serta sangat minimnya pembinaan dari pihak pemerintah.

¹⁷ Syahrial Nadir, dkk., Pengurus FKMD Kota Padang Periode 2003-2007, *wawancara langsung*, Selasa, 10 Juli 2007, di Sekretariat FKMD Kota Padang.

¹⁸ Winarno Surachmad, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar*, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 45

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan-tujuan pendidikan di MDA perlu dikelola secara profesional dengan manajemen yang baik dan tepat sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat, orang tua, pengurus, dan pemerintah. Suatu keberhasilan melengkapi organisasi, manajemen kelembagaan dan manajemen pendidikan, adalah merupakan langkah awal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi MDA. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan kegiatan manajemen Madrasah Diniyah. Sebagaimana diungkapkan Mulyasa,¹⁹ bahwa manajemen madrasah terdiri dari manajemen SDM (kepala, guru, TU, penjaga), di samping kesiswaan, sarana dan prasarana, pembiayaan atau anggaran, dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan madrasah merealisasikan tujuan dan fungsinya, diperlukan manajemen lembaga yang baik, dan dukungan berbagai faktor. MDA harus diberdayakan agar mampu menciptakan SDM yang memiliki kualitas keimanan, ketaqwaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memelihara dan mengembangkan eksistensi bangsa.

Peranan kepala madrasah merupakan tokoh kunci menentukan berhasil proses belajar mengajar dan sekaligus menentukan keberhasilan suatu madrasah. Ia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggerakkan dan mengerahkan guru dan semua unsur madrasah dalam mewujudkan tujuan-tujuan madrasah. Dengan demikian kualitas kepemimpinan madrasah signifikan sebagai kunci keberhasilan suatu madrasah. Untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan MDA mencapai tujuannya kepala MDA dituntut untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Diniyah

¹⁹ Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Kementerian Agama RI., Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: 2005), h. 19-23

Takmiliyah,²⁰ bahwa untuk menunjang hasil yang maksimal dari berbagai kegiatan manajemen MDA tersebut dibutuhkan kemampuan proposional seorang pimpinan. Kasman²¹ juga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan manajemen diperlukan seorang pemimpin dan administrator yang berpandangan luas dan berkemampuan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Manajemen MDA yang profesional mutlak diperlukan bagi pengelolaan dan bagi pengawasan, agar indikator-indikator kegiatan manajemen itu dapat diterapkan secara baik, dioptimalisasikan dan semua komponen dari sistem dapat berjalan secara terencana, terorganisir, terarah, termonitoring, terkoordinir, dan terkontrol serta terevaluasi baik pada efektifitas maupun pada segi efisiensinya. Mulyasa mengatakan, “Kegagalan dan keberhasilan madrasah banyak ditentukan oleh kepala madrasah, karena merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh madrasah menuju tujuannya.”²²

Pencapaian tujuan pendidikan yang optimal berhasil dan berdayaguna, amat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan pendidikan MDA. Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, di samping menerima dan memberi pengaruh dari dan pada lingkungannya, juga dipengaruhi oleh komponen-komponen yang merupakan substansi-substansi dari sistemnya sendiri. Ini

²⁰ Lihat, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah*, (Departemen Agama RI, 2007), h. 42

²¹ Kasman Thaib, (Kasi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama Kota Padang, Manajemen Madrasah Diniyah Awaliyah, *Makalah*, disampaikan pada “Pembinaan Guru dan Peningkatan Mutu Madrasah Diniyah Awaliyah”, 9 Agustus 2004, di Padang, h. 4

²² Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 158

menunjukkan bahwa efektifitas dan efisiensi organisasi MDA termasuk organisasi pembina MDA, terlahir karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang tidak terlepas dari lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kaitan yang sangat erat antara faktor sumber daya manusia dengan non manusia yang didayagunakan dalam proses pendidikan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, aspek yang paling penting dan mendasar dalam kaitannya dengan manajemen Madrasah Diniyah adalah kualitas kepala dan guru dalam memberdayakan setiap komponen yang ada serta keterkaitannya dengan pengelolaan pendidikan MDA, tanpa mengabaikan apa yang ada di luar MDA.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa aspek pengelola yakni kepala MDA, merupakan aspek yang dapat diduga sebagai penyebab keberhasilan manajemen pendidikan MDA sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kepala madrasah, merupakan unsur yang paling menentukan keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Di Kota Padang ada 162 MDA, umumnya telah dikelola dengan baik, di antaranya adalah MDA Baitul Haadi Aur Duri Indah.

Paradigma baru manajemen pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas secara efektif dan efisien, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM, khususnya kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan di madrasahnyanya merupakan suatu tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pengelolaan yang komprehensif, harus diarahkan pada berbagai aspek atau fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, mulai dari *input*, *proses*, *output*, bahkan sampai *outcome* dari manajemen madrasah. Kajian

pengelolaan MDA ini dilihat dari beberapa sudut, antara lain dari pengelolaan lembaga dan organisasi penyelenggara MDA pada tingkat makro dan mikro.

Rumusan keberhasilan organisasi tidak saja mempertimbangkan sasaran organisasi, tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dari mengejar pada suatu sasaran. Hal ini dicapai dengan mengoptimalkan sistem pengelolaan pada seluruh komponen atau fungsi secara baik dan benar sehingga menghasilkan proses dan output dari suatu lembaga secara baik dan konsekuen.

Guru merupakan bagian integral dari keberadaan SDM yang mempunyai peranan strategis dalam kehidupan suatu madrasah. Guru adalah faktor yang paling esensial di dalam proses pendidikan yang ditugasi dengan pekerjaan untuk menghasilkan perubahan yang telah direncanakan pada anak didik. Hal ini hanya dapat dilaksanakan oleh sekelompok manusia profesional, yaitu manusia yang memiliki kompetensi mengajar, yaitu guru. Guru merupakan SDM yang sangat menentukan keberhasilan program pendidikan. Oleh karena itu manajemen guru mutlak dilakukan sebagai layanan profesional kepala madrasah, penilik madrasah dan pengawas untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang bermuara kepada peningkatan mutu lulusan. Sementara peserta didik adalah klient utama yang harus dilayani, dan hak-hak peserta didik secara individual harus dilindungi dan kebutuhan pendidikan mereka harus dipenuhi. Manajemen peserta didik mutlak perlu menjadi perhatian, yakni proses pengaturan kegiatan dari hal-hal yang berhubungan dengan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum merupakan bagian yang sangat menentukan perjalanan dan keberhasilan atau kualitas sebuah lembaga pendidikan. Dalam suatu sistem

pendidikan, kurikulum merupakan komponen yang teramat penting, ia merupakan panutan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Kualitas keluaran proses pendidikan antara lain ditentukan oleh kurikulum dan efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu fokus utama manajemen pendidikan terletak pada manajemen kurikulum pembelajaran. Keberhasilan pendidikan amat sangat terkait dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum pendidikan, selanjutnya akan bermuara pada dapurnya yang disebut pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu rencana atau program, kurikulum tidak akan bermakna manakala tidak diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Sebaliknya, tanpa kurikulum yang jelas sebagai acuan, maka pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif.

Adapun keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Sedangkan sarana prasarana mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan, bahkan termasuk komponen yang harus dipenuhi. Tanpa sarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan bisa menggagalkan pendidikan. Sementara tanpa kurikulum pembelajaran belum bisa menentukan sebuah lembaga pendidikan itu berhasil karena kurikulum pembelajaran itu adalah jantungnya sebuah lembaga pendidikan.

Memperhatikan uraian di atas, difahami bahwa manajemen SDM; guru dan peserta didik, kurikulum pembelajaran, keuangan serta sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan di samping yang lainnya. Dengan demikian manajemen yang baik sangat diperlukan bagi sebuah lembaga

pendidikan Islam seperti halnya Madrasah Diniyah Awaliyah. Syafaruddin menyatakan, bahwa “hanya dengan kesiapan manajemen pendidikan yang efektif, lembaga pendidikan Islam dapat merespon perubahan sehingga tidak akan mengalami stagnasi (kemacetan) dan ketinggalan dalam dinamika perubahan yang cepat”²³

Informasi terakhir diperoleh data MDA tahun 2007-2008 bahwa di Sumatera Barat tercatat 1.116 MDA dengan 100.016 peserta didik.²⁴ Sedangkan Di Kota Padang tercatat 162 MDA dan 900 orang guru, 14 orang di antaranya berstatus PNS, serta lima orang pengawas. Ditemukan sebagian MDA telah baik manajemennya berkat pembinaan pengurus, jamaah dan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan dari instansi pemerintah.²⁵ MDA Baitul Haadi,²⁶ adalah salah satu MDA yang dipandang terbaik dan berhasil di antara MDA yang dinilai baik di Kota Padang. Guru-guru dan peserta didiknya serta pengelolaan kurikulum pembelajaran, demikian juga pengelolaan dana, dan sarana prasarana-nya dikelola dengan baik.

Keberhasilan MDA Baitul Haadi ini diketahui pula berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan. Hasil dari beberapa kali *grand tour* yang penulis lakukan, sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2007. Kemudian

²³ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.2

²⁴ Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat, Bidang Pekapontren, *Arsip*, Data MDA Sumatera Barat keadaan tahun 2007-2008

²⁵ Darmis Darwis, Kepala Seksi Pekapontren Kementerian Agama Kota Padang, *wawancara*, di Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Jum’at, 6 Juli 2007.

²⁶ Syahril Nadir, dk., Pengurus FKMD Kota Padang Periode 2003-2007, bersama pengawas pendidikan Kementerian agama Kota Padang, *wawancara langsung*, di Sekretariat FKMD Kota Padang, Selasa 10 Juli 2007. Hal ini didukung oleh pengisian data oleh ketua-ketua FKMD kecamatan se-Kota Padang.

tahun berikutnya dan kembali setelah seminar dilakukan observasi bulan Mei-Juni 2008, penulis menemukan berbagai kegiatan sebagai berikut; (1) perekrutan guru dilakukan dengan seleksi yang teliti dan sesuai kebutuhan, melibatkan guru dalam berbagai kegiatan keagamaan, melakukan pembinaan guru melalui program bulanan dan tahunan, menetapkan persyaratan guru yang diterima harus mempunyai kemampuan baca tulis al Quran di samping persyaratan lainnya, penempatan guru dengan kebijakan, menerapkan disiplin guru dengan baik, menanamkan sifat solidaritas guru, (2) penerimaan peserta didik baru berdasarkan syarat-syarat, menanamkan sifat solidaritas berbagai aktifitas peserta didik, menerapkan motivasi belajar peserta didik melalui disiplin dan kerja sama semua pihak; masyarakat, orang tua, dan pemerintah, menerapkan disiplin peserta didik dalam setiap kegiatan, prestasi belajar peserta didik baik sekali, meningkatkan kredibilitas MDA melalui program wisuda dan khatam al Quran secara rutin, (3) melaksanakan kurikulum pembelajaran nasional di samping kurikulum lokal, mempunyai program unggulan di bidang tilawah, tartil dan tahfizh, proses pembelajaran diatur dengan baik dan dengan penerapan disiplin yang ketat (4) sumber dana berhasil diperoleh dari berbagai pihak dan pengelolaannya didukung dengan baik (5) memiliki sarana pendidikan cukup memadai.

Kondisi ini dihubungkan dengan keberadaan MDA secara umum di Kota Padang pada sebagiannya ada kesamaan, namun ada beberapa keunikan yang terlihat di MDA Baitul Haadi seperti; Semua guru berpendidikan memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dan mengikuti uji kompetensi serta punya pengalaman khusus terkait baca tulis *al-Qurān*. Melaksanakan kerja sama dengan

orang tua, lembaga pemerintah, dan organisasi sosial kemasyarakatan secara terus menerus. Mempunyai program unggulan, memiliki peserta didik berprestasi secara terus menerus, memiliki budaya disiplin, berperilaku baik dan memiliki anggaran rutin untuk peningkatan kualitas pendidikan MDA. Menerapkan manajemen secara sistematis dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran.

Hal-hal ini semua tidak hanya dapat diketahui melalui pengamatan sementara, wawancara atau ungkapan dari berbagai unsur, tapi lebih jauh akan diketahui dengan melihat, mengamati, memperhatikan, serta membaur bersama pada proses pengelolaan MDA itu berlangsung.

Dari berbagai latar belakang di atas, dan didukung oleh keinginan yang kuat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, melihat, mengamati, melakukan, mengelola, mengawasi, dan sebagainya, penulis ingin mempelajari secara lebih dekat dan dalam tentang pengelolaan MDA yang telah menemukan suatu keberhasilan yang dicita-citakan. Dengan dasar hal-hal dimaksud, penulis mengangkat permasalahan; Bagaimana pelaksanaan manajemen MDA Baitul Haadi sehingga bisa membawa peserta didiknya berhasil?

Bagaimana MDA Baitul Haadi bisa melakukan hal-hal tersebut? Mengapa para gurunya dapat dikelola seperti demikian? Mengapa para peserta didiknya bisa mengikuti peraturan yang telah dibuat? Dan mengapa MDA bisa mendapat dukungan berbagai unsur? Di sisi lain, masih ada MDA yang dikelola apa adanya, kemampuan tenaga pengajar profesional di bidangnya belum sepenuhnya sesuai harapan. Sementara pendapat di antara masyarakat bahwa mengajar di MDA adalah merupakan batu loncatan dan persinggahan bagi seseorang guru menjelang

mereka mendapatkan pekerjaan yang tetap. Atau sebagai persinggahan bagi umumnya mahasiswa menjelang mereka mendapatkan ijazah, sehingga terkesan mengajar di MDA sebagai tugas sampingan.

Selanjutnya, realitas menunjukkan bahwa agama dan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai lebih dalam pembentukan moral dan kepribadian anak bangsa. Hal ini terlihat dari kepribadian anak bangsa yang terlalu rapuh dan rentan untuk mengatasi persoalan-persoalan pelik kebangsaan, apalagi menghadapi tantangan masa depan dan arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi *information superhighway*, yang bergerak sangat cepat melampaui batas-batas negara, sosio-kultural bahkan agama sekalipun.

Pembentukan kepribadian manusia (*character and moral building*) yang seimbang, sehat dan kuat, sangat dipengaruhi oleh pendidikan agama dan internalisasi nilai keagamaan dalam diri peserta didik. Idealnya agama menginternalisasi ke dalam jiwa anak yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kepribadian, yang dimulai semenjak dalam kandungan (*pra-natal*) hingga mendapat pendidikan melalui bimbingan orang tua selanjutnya memasuki lembaga formal dan non formal. Kepribadian yang terbentuk melalui proses pendidikan ini akan mempengaruhi sikap, perilaku dan cara berpikir. Dengan demikian pendidikan agama di MDA hanyalah satu tahapan dari proses pembentukan kepribadian anak bangsa.

Pada sisi lain, Pendidikan Agama Islam di sekolah belum dapat memuaskan disebabkan porsi jam yang dirasakan kurang, sehingga sangat diperlukan

tambahan pendidikan agama dan praktik-praktik keagamaan melalui pendidikan non formal, di antaranya adalah MDA, yang berpusat di mesjid dan atau musala.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai usaha bagi semua komponen, baik pemerintah, masyarakat dan orang tua. Baik melakukan usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan MDA, melalui kurikulum MDA, penguatan adanya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, sebagaimana disebut di atas. Upaya Kementerian Agama sebagai pembina teknis, seperti melakukan sosialisasi, memberikan pembinaan dan pengawasan, memberi bantuan tenaga guru agama dan kepala berstatus pegawai negeri sipil, sekalipun hal ini baru terbatas jumlahnya dibanding jumlah MDA yang ada, yaitu berbanding 14 PNS dengan 162 MDA. Selanjutnya, pembinaan dilakukan melalui jalur organisasi Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD), dan melalui Persatuan Guru Diniyah Islamiyah (PGDI).

Pembinaan dan pengawasan Kementerian Agama belum banyak menyentuh sasaran, serta potensi MDA di Kota Padang, masih sangat bervariasi; seperti tenaga profesional, sumber dana, kurangnya dukungan masyarakat, kemampuan dan motivasi belajar mengajar guru. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pekapontren dalam makalahnya,²⁷ bahwa problema yang dihadapi madrasah diniyah antara lain adalah pola manajemen undividual yang kurang transparan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, ketidakjelasan visi dan misi dikalangan penyelenggara madrasah diniyah, dan

²⁷Direktur Pekapontren: Arah dan Kebijakan Kementerian Agama RI. Dalam Pengembangan Madrasah Diniyah, *makalah*, (Ciawi, 20 Desember 2005), h. 2

penyelenggaraan administrasi pendidikan yang di bawah standar. Fenomena-fenomena seperti demikian akan berdampak kepada kinerja guru, dan hasil yang hendak dicapai sebagai tujuan MDA. Untuk mengatasi permasalahan yang kurang menguntungkan tersebut, maka dibutuhkan kehadiran MDA yang dikelola secara profesional dengan manajemen yang baik dan tepat sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat, orang tua, pengurus, dan pemerintah. Hal ini akan dapat dirasakan kelak, seperti tingginya tingkat minat belajar peserta didik dan kesadaran moralnya; yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku mereka sehari-hari sebagai seorang muslim.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah penelitian difokuskan kepada: Bagaimana Manajemen MDA Baitul Haadi Padang dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran?

C. Sub Fokus Penelitian

Penyelenggaraan dan keberhasilan dalam manajemen Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) ditentukan oleh unsur-unsur atau komponen-komponen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya pelaksanaan manajemen MDA. Komponen-komponen yang terkait dengan manajemen MDA adalah kepala madrasah, guru, pengurus, pembina/Kemenag, orang tua, tokoh masyarakat serta pengurus organisasi profesional. Keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan peneliti tidak mungkin untuk mengungkapkan semua komponen yang terlibat dengan manajemen MDA. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil

pembahasan yang mendalam, maka berdasarkan fokus penelitian di atas dirumuskan sub fokus dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) guru dan peserta didik yang diterapkan oleh kepala?
2. Bagaimana pelaksanaan manajemen kurikulum pembelajaran yang diterapkan oleh kepala MDA?
3. Bagaimana manajemen keuangan yang diberlakukan oleh kepala MDA?
4. Bagaimana manajemen sarana prasarana oleh kepala MDA?
5. Bagaimana implikasi pelaksanaan manajemen MDA Baitul Haadi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan manajemen yang diterapkan pada MDA Baitul Haadi Padang dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Adapun secara khusus tujuan penelitian adalah untuk;

1. Mengungkapkan dan mengkaji manajemen Sumber Daya Manusia (guru dan peserta didik), yang diterapkan pada MDA Baitul Haadi.
2. Mengungkapkan dan mengkaji manajemen kurikulum pembelajaran yang diterapkan pada MDA
3. Mengungkapkan dan mengkaji manajemen keuangan yang diberlakukan pada MDA
4. Mengungkapkan dan mengkaji manajemen sarana prasarana yang dilakukan pada MDA

5. Mengungkapkan implikasi pelaksanaan manajemen MDA terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama untuk para pengambil kebijakan atau keputusan (*decision maker*), para pengelola satuan pendidikan, para guru atau praktisi pendidikan, dan para peserta didik.

- a. Bagi pengambil kebijakan atau keputusan (*decision maker*) hasil penelitian berupa model²⁸ manajemen pada MDA yang mampu meningkatkan efisiensi (melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi) dan meningkatkan mutu pendidikan (melalui revitalisasi partisipasi orang tua, fleksibilitas pengelolaan madrasah dan pembelajaran, peningkatan profesionalisme guru dan kepala madrasah serta berlakunya sistem hadiah dan hukuman). Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk dikembangkan dan didiseminasikan pada jenjang MDA dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan yang pada gilirannya juga mengoptimalkan manajemen suatu lembaga pendidikan Islam nonformal.
- b. Bagi pengelola satuan pendidikan.

²⁸ Studi mendalam untuk membentuk suatu model (pola atau acuan) berdasarkan saling berhubungan antara data yang ditemukan. *Context is essential to understanding*. Diharapkan dengan cara demikian, muncul suatu pemikiran, bisa sama sekali baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada. Dapat ditransfer (*Transferability*) hanya merupakan kemungkinan, tetapi perlu penyesuaian.

Dengan ditemukannya model manajemen yang bisa mengoptimalkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar atau tujuan pendidikan, maka dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses dan tujuan pendidikan yang bergerak pada tingkatan MDA dapat dijadikan model ini sebagai salah satu alternatif untuk diterapkan dalam satuan pendidikan yang berada di bawah pengelolaan dan pembinaannya.

c. Bagi guru atau praktisi pendidikan

Dengan model manajemen yang telah diterapkan pada MDA Baitul Haadi dapat memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan MDA yang telah diberikan selama ini. Melalui model manajemen madrasah tersebut kepala dapat meningkatkan kualitas SDM guru pada pendidikan MDA yang mementingkan proses dan tujuan yang diharapkan.

d. Bagi peserta didik

Melalui pelaksanaan model manajemen MDA yang dihasilkan penelitian, peserta didik akan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta perilaku islami yang diharapkan orang tua dan masyarakat.

2. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan *in-put* atau sumbangan pikiran berupa manajemen suatu lembaga pendidikan Islam nonformal, terutama yang berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen yang menekankan pada perlunya kualitas kepala dan guru dalam memberdayakan setiap komponen yang ada serta keterkaitannya dengan pengelolaan pendidikan suatu lembaga MDA.

Sumbangan pikiran tersebut didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan pendidikan berbasis madrasah atau masyarakat yang dikembangkan dalam pengelolaan MDA Baitul Haadi Padang. Apakah model manajemen tersebut bisa diadopsi langsung secara keseluruhan atau perlu dilakukan penyesuaian seperlunya bilamana diterapkan dalam pengelolaan SDM guru dan peserta didik, kurikulum pembelajaran, keuangan, dan sarana prasarana, temuan inilah yang diharapkan akan dapat memberikan jawaban.

E. Penjelasan Judul

Setiap variabel penelitian memiliki beberapa dimensi yang merupakan penjelasan atas variabel tersebut, yang ditentukan atas dasar konsep teoritik, hasil kajian-kajian sebelumnya, serta pemikiran-pemikiran dari para peneliti. Adapun penjelasan judul masing-masing variabel sebagai berikut.

1. Studi kasus adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Menurut Robert²⁹ studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “*how*” atau “*why*”, dan bila fokus penelitiannya tertelak pada fenomena kontemporer. Pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” lebih eksplanatoris dan lebih mengarah kepenggunaan strategi-strategi studi kasus, historis, dan eksperimen. Oleh karena itu penelitian ini tidak bisa menggantikan survey atau telaah rekaman arsip akan tetapi peneliti harus menyelenggarakan analisis historis atau studi kasus.

²⁹ Robert, K.Yin., *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, (Alih Bahasa: Djauzi Mudzakir), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 1 dan 9

2. MDA adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa sekolah Dasar/ sederajat dengan masa belajar 4 tahun, dan jumlah jam belajar minimal 18 jam seminggu.³⁰ MDA Baitul Haadi, sebuah MDA mendapat penilaian MDA teladan di Kota Padang dan termasuk MDA terbaik di antara 11 MDA terbaik dari 11 kecamatan di Kota Padang³¹. MDA Baitul Haadi memiliki beberapa karakteristik yang dapat dilihat pada: - program unggulan, - program rutin akhir tahun, - program pekan ta'aruf pada awal tahun ajaran, - terciptanya suasana pendidikan dan pembelajaran yang terkoordinir hingga tercipta keteraturan dan kedisiplinan. Peserta didiknya berasal dari dalam dan luar komplek, bahkan di luar kecamatannya, berprestasi dalam ajang kompetensi secara terus menerus.
3. Manajemen MDA ialah segala usaha bersama (guru, peserta didik, pengurus, masyarakat dan orang tua peserta didik, pemerintah, dan organisasi mitra kerja Kementerian Agama) untuk mendayagunakan berbagai sumber baik personil maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan MDA secara optimal. Artinya kegiatan yang diupayakan kepala MDA bagi kepentingan madrasahnyanya yaitu kegiatan SDM guru dan peserta didik, kurikulum pembelajaran, keuangan, dan sarana

³⁰ Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI., *Pedoman Peyelenggaraan Diniyah Takmiliah*, tahun 2007, h. 5

³¹ Daftar Blangko isian MDA terbaik bagi pengurus-pengurus Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Awaliyah (FKMDA) kecamatan se Kota Padang pada acara tabligh akbar (dihadiri seluruh pengurus FKMDA, kepala MDA serta para guru MDA se Kota Padang), di Mesjid Nurul Hasanah Kuranji Padang, disertai pendapat Sekretaris: Junaida, pengurus FKMD Kota Padang, wawancara, Tanggal 29 Oktober 2007. Piagam MDA terbaik se Kota Padang tahun 2006. MDA Baitul Haadi juga dijadikan sebagai contoh, Syamsul Bahri, Kepala Kemenag Kota Padang, wawancara langsung, di Kantor Kemenag Kota Padang, 20 Januari 2009

prasarana. Manajemen MDA yang diterapkan kepala MDA sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen tersebut adalah dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan. Konsep ini dikembangkan Suryosubroto (2002), Wahjosumidjo (2002), Mulyasa, Hasibuan, Malayu (2007), Hadiyanto (2007). Manajemen MDA dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola lembaga pendidikan keagamaan Islam. Konsep ini dikembangkan oleh Sallis, Edward (2008), Sondang P. Siagian (1980), Bafadal Ibrahim (2003), Nawawi (1989), Syafaruddin (2005), Djamas, Nurhayati (2005), Suryosubroto (2004), Hadiyanto (2000), Sanjaya Wina (2009), Mulyasa (2005 dan 2004)

4. Manajemen Sumber daya Manusia (SDM) guru dimaksud adalah pembinaan guru dengan serangkaian usaha bantuan kepada guru terutama layanan profesional melalui proses rekrutmen, seleksi, penempatan guru serta pembinaan yang dilakukan oleh kepala madrasah, penilik madrasah/pengawas untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang bermuara kepada peningkatan mutu lulusan.
5. Manajemen SDM peserta didik dimaksudkan adalah proses pengaturan kegiatan dari hal-hal yang berhubungan dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan mulai dari proses penerimaan, penempatan dan pembinaan dan pelayanan peserta didik.
6. Manajemen kurikulum pembelajaran dimaksudkan adalah serangkaian proses yang diterapkan meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi atau pengawasan. Pengelolaan program pembelajaran bersama

tenaga kependidikan lain menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam berbagai program.

7. Manajemen keuangan dimaksudkan adalah usaha pengelolaan sumber keuangan, pemanfa'atan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang diberlakukan oleh kepala MDA dalam lembaga pendidikannya.
8. Manajemen sarana prasarana pendidikan adalah proses pengurusan mulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif-efesien.
9. Implikasi manajemen MDA terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, secara operasional dimaksud sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis guru dan peserta didik, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Konsep yang dikembangkan untuk meningkatkan peran madrasah dan pendukung lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah adalah *School Based Management (SBM)*³² dan Manajemen Berbasis Madrasah (Mulyasa)³³

³² Nurhayati Djamas, *Manajemen Madrasah Mandiri*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2005), h. iii

³³ Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Kementerian Agama RI. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 9Jakarta: 2005, h. 4-7

Foot Not BAB I

1. Lihat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI., *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: 2006), h. 8, 21-22, dan 35
2. Fokus Media (Tim Redaksi), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wajib Belajar*, (Peraturan Pemerintah RI. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan), (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 96-97
3. Permenag RI. No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, tanggal 21 Februari 2012, *Salinan sesuai aslinya*, oleh Mubarak, Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri, h. 3. Dan lihat: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah*, (Departemen Agama RI., 2007), h. 5. Istilah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), sebelumnya bernama Madrasah Diniyah. Di Kota Padang masih bernama MDA, MDW dan MDU.
4. Lihat: Zainal Abidin Syam, (Kepala Biro Perencanaan Departemen Agama RI.), Strategi Peningkatan Partisipasi Departemen Agama dalam Pembangunan Sektor Agama, *Makalah*, disampaikan pada seminar dalam Pentaloka Manajemen Strategis Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Agama tahun 2004, di Jakarta Juli 2004), h. 4-9
5. Lihat: Yusuf, Chairul Fuad, Laporan Semester Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun 2009, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI., Tahun 2009), h. 18,39, 49, dan 60
6. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h 110
7. Safwan, Mardanas dan Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*, (Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981), h. 57. Awalnya pendidikan Islam di Sumatera Barat berlangsung di rumah guru, di Surau yang lebih dikenal dengan “pengajian *al-Qurān*”, dan diasuh oleh seorang Malin atau Ulama. Lembaga ini tumbuh di setiap pemukiman masyarakat yang kemudian berkembang dengan nama Taman Pendidikan *Al-Qurān* dan Seni *al-Qurān* (TPA/TPSA), dikelola oleh pengurus mesjid dan mushalla. Melalui musyawarah Nasional II Lembaga Pengembangan Tilawatil-Qurān (LPTQ) di Banda Aceh, resmi diterima sebagai modus pendidikan *al-Qurān* secara Nasional (Lihat: Hasnawi Karim, Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat, dalam Kurikulum dan Pedoman Pengelolaan TPA/TPSA Propinsi Sumatera Barat, (Padang: Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat, 1987), h. 10)
8. Irfan, M., Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam, dalam: *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h.4
9. H. Darwas, Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat, Pandangan terhadap Kemampuan Baca *al-Qurān* Usia Sekolah yang belajar di TPA/MDA, disampaikan pada acara audiensi Pengurus BKS TPA/TPSA Propinsi Sumatera Barat di ruang kerjanya, Sabtu , 22 September 2007 H/10 Ramdhan 1428 H.
10. Basuni Aziz, *Pendidikan Indonesia dalam Pandangan 15 Tokoh Pendidikan wasta*, (Jakarta: Dasamedia Utama: 1993), h. 6
11. Syahrial Nadir, Pengurus FKMD Kota Padang Periode 2003-2007, *wawancara langsung*, di Sekretariat FKMD Kota Padang, Selasa 10 Juli 2007. Hal senada juga disampaikan Datuk Djohardi, Junaida, sekretaris FKMD Kota Padang.

12. Darmis Darwis, Kepala Seksi Pekapontren Kementerian Agama Kota Padang, *wawancara*, Jum'at, 6 Juli 2007.
13. A. Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), h. 104
14. A. Malik Fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 250
15. Lihat: Husni Rahim, *Arah baru Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Logos Wacana, 2001), h. 3
16. Syahril Nadir, Pengurus FKMD Kota Padang Periode 2003-2007, *wawancara langsung*, di Sekretariat FKMD Kota Padang, Selasa 10 Juli 2007. Hal senada juga disampaikan Datuk Djohardi, Junaida, sekretaris FKMD Kota Padang.
17. Surachmad, Winarno, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 45
18. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Kementerian Agama RI., Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: 2005), h. 19-23
19. Lihat: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliah*, (Departemen Agama RI., 2007), h. 42
20. Thaib, Kasman, (Kasi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama Kota Padang, Manajemen Madrasah Diniyah Awaliyah, *Makalah*, disampaikan pada "Pembinaan Guru dan Peningkatan Mutu Madrasah Diniyah Awaliyah", 9 Agustus 2004, di Padang, h. 4
21. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 158
22. Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.2
23. Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat, Bidang Pekapontren, *Arsip*, Data MDA Sumatera Barat keadaan tahun 2007-2008
24. Darmis Darwis, Kepala Seksi Pekapontren Kementerian Agama Kota Padang, *wawancara*, Jum'at, 6 Juli 2007.
25. Syahril Nadir, dk., Pengurus FKMD Kota Padang Periode 2003-2007, bersama pengawas pendidikan Kementerian agama Kota Padang, *wawancara langsung*, di Sekretariat FKMD Kota Padang, Selasa 10 Juli 2007. Hal ini di dukung oleh pengisian data oleh ketua-ketua FKMD kecamatan se-Kota Padang.
26. Direktur Pekapontren: Arah dan Kebijakan Kementerian Agama RI. Dalam Pengembangan Madrasah Diniyah, *makalah*, (Ciawi, 20 Desember 2005), h. 2
27. Studi mendalam untuk membentuk suatu model (pola atau acuan) berdasarkan saling berhubungan antara data yang ditemukan. *Context is essential to understanding*. Diharapkan dengan cara demikian, muncul suatu pemikiran, bisa sama sekali baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada. Dapat ditransfer (*Transferability*) hanya merupakan kemungkinan, tetapi perlu penyesuaian.

28. Robert, Robert. K. Yin., *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, (Alih Bahasa: Djauzi Mudzakir), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 1 dan 9
29. Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI., *Pedoman Peyelenggaraan Diniyah Takmiliyah*, tahun 2007, h. 5
30. Daftar Blangko isian MDA terbaik bagi pengurus-pengurus Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Awaliyah (FKMDA) kecamatan se Kota Padang pada acara tabligh akbar (dihadiri seluruh pengurus FKMDA, kepala MDA serta para guru MDA se Kota Padang), di Mesjid Nurul Hasanah Kuranji Padang, disertai pendapat Sekretaris: Junaida, pengurus FKMD Kota Padang, *wawancara*, Tanggal 29 Oktober 2007. Piagam MDA terbaik se Kota Padang tahun 2006. MDA Baitul Haadi juga dijadikan sebagai contoh, Syamsul Bahri, Kepala Kemenag Kota Padang, *wawancara langsung*, di Kantor Kemenag Kota Padang, 20 Januari 2009
31. Djamas, Nurhayati, *Manajemen Madrasah Mandiri*, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2005, h. iii
32. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Kementerian Agama RI. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2005, h. 4-7